

Gaya Kepemimpinan Donald Trump dalam Kebijakan *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA) pada Dreamers

Putrima Arini¹, Haiyyu Darman Moenir², Zulkifli Harza³

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Andalas, Padang, Indonesia

E-mail: ¹putrimaarini2001@gmail.com, ²haiyyu_darman@fisip.unand.ac.id,
³zulkifliharza@soc.unand.ac.id

Abstract

The United States is the country with the highest immigrant population in the world, comprising 13.6% of its total population. The Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) policy, introduced by former President Barack Obama, was a measure aimed at reducing the number of illegal immigrants in the U.S. A significant majority of DACA recipients, approximately 81%, are originally from Mexico. Donald Trump sought to rescind the DACA policy established by Obama. This study is a qualitative research using a descriptive analysis method based on literature review. This study aims to examine Donald Trump's leadership style in the context of the DACA policy rescission and its potential impact on international relations and the global image of the U.S. Trump perceived the presence of immigrants as an obstacle to his efforts to enhance the well-being of native-born Americans, necessitating measures to curb immigration in the U.S. The repeal of DACA faced opposition from various parties, who viewed it as a violation of human rights and financially detrimental to the U.S. Trump's role in the rescission of the DACA policy is analyzed using the conceptual framework of "Leader Trait Analysis" by Margaret G. Hermann, et al. This framework identifies three components as parameters of Trump's leadership style and dominance: reaction to political constraints, openness to information, and motivation for action. Based on the operationalization of these concepts, it is concluded that Trump opposed political constraints and disregarded all input and information presented to him in the process of repealing DACA. Furthermore, it was found that Trump was motivated by his priority to enhance the welfare of native-born Americans. Thus, it can be concluded that Trump exhibits a crusader, directive, and goal-driven leadership style.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Donald Trump, DACA, Imigran, Meksiko.

Pendahuluan

Isu imigrasi di Amerika Serikat (AS) selalu menjadi topik kontroversial dalam politik nasional, terutama sejak kebijakan *War on Terror* diberlakukan pasca serangan 9/11 di bawah pemerintahan Presiden George W. Bush. Kebijakan ini memperkuat sentimen negatif terhadap imigran, terutama Muslim, dan

meluas ke seluruh kelompok imigran lainnya, menciptakan pandangan negatif yang tidak pandang bulu terhadap etnis dan status sosial (Ewing, 2017). Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada 2017, AS memiliki jumlah populasi imigran tertinggi di dunia, yaitu 49,8 juta orang atau 13,6% dari total populasi nasional (PBB, 2017).

Untuk mengatasi masuknya imigran ilegal, Presiden Barack Obama memperkenalkan Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) pada 2012. Kebijakan ini memberikan izin tinggal sementara kepada imigran yang datang ke AS di bawah usia 16 tahun, tidak memiliki catatan kriminal, dan memenuhi syarat tertentu, seperti berpendidikan dan telah berada di AS sejak Juni 2007. Data dari U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) menunjukkan bahwa pada September 2022, terdapat 589.660 penerima DACA aktif, yang mayoritas berasal dari Meksiko (81%), El Salvador (4%), dan Guatemala (3%) (USCIS, 2022).

Ketika Donald Trump mencalonkan diri sebagai Presiden pada 2016, ia menggunakan isu imigrasi sebagai salah satu agenda kampanyenya, dengan menggambarkan imigran Meksiko sebagai ancaman terhadap ekonomi dan keamanan AS. Trump menilai bahwa imigran mencuri pekerjaan warga asli dan membawa kejahatan. Setelah terpilih, Trump berusaha keras untuk menghapuskan DACA, dengan alasan bahwa kebijakan tersebut inkonstitusional dan mendorong imigrasi ilegal (Nguyen, 2017). Pada 5 September 2017, Jaksa Agung Jeff Sessions mengumumkan bahwa DACA akan diakhiri, memberi waktu enam bulan bagi Kongres untuk merumuskan alternatif kebijakan.

Langkah Trump untuk menghapus DACA menuai kontroversi. Banyak pihak, termasuk ekonom terkemuka seperti Ike Brannon dan Logan Albright dari CATO Institute, menyatakan bahwa penghapusan DACA akan merugikan ekonomi AS hingga \$283 miliar, termasuk \$215 miliar kerugian ekonomi, \$60 miliar hilangnya pendapatan pajak, dan \$7,5 miliar biaya deportasi (Becerra, 2019). Studi dari *Journal of Public Economics* pada 2016 menunjukkan bahwa

DACA justru meningkatkan partisipasi angkatan kerja sebesar 50.000 hingga 75.000 orang dan mengurangi jumlah imigran ilegal (Pope, 2016).

Meskipun Trump gigih untuk membatalkan DACA, Mahkamah Agung AS memutuskan pada Juni 2020 bahwa langkah tersebut sewenang-wenang dan tidak sah. Trump kemudian mencoba membatasi perpanjangan izin tinggal penerima DACA dari dua tahun menjadi satu tahun, tetapi upayanya ditolak oleh hakim federal (Nguyen, 2017). Ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakannya gagal, Trump tetap berusaha mengubah arah kebijakan imigrasi AS.

Kebijakan keras Trump terhadap imigran mencerminkan pendekatan yang lebih agresif dalam hal keamanan nasional dan tatanan liberal internasional. Gaya kepemimpinannya yang konfrontatif menantang norma dan lembaga global, serta memengaruhi hubungan diplomatik dengan negara-negara asal imigran, terutama di Amerika Latin (Ewing, 2017). Kasus DACA memperlihatkan bagaimana perubahan kebijakan dalam negeri AS dapat berdampak pada persepsi internasional terhadap AS, serta memengaruhi hak asasi manusia dan hubungan bilateral.

Penelitian tentang kebijakan DACA ini penting untuk memahami dampak gaya kepemimpinan Trump terhadap migrasi global dan politik internasional. Ketegasan Trump dalam menekan masuknya imigran ilegal menegaskan bahwa meskipun DACA gagal dihapuskan, kebijakan-kebijakan ini membawa perubahan besar pada struktur dan penegakan imigrasi AS (Pope, 2016).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara mendalam tanpa menggunakan kuantifikasi. Metode kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan pemahaman yang lebih detail mengenai masalah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan data berupa narasi hasil wawancara, pengamatan, dan data sekunder lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis guna menjelaskan

fenomena gaya kepemimpinan Donald Trump dalam kebijakan Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) terhadap Dreamers. Unit analisis adalah Donald Trump sebagai individu, yang berperan sebagai variabel dependen, sedangkan kebijakan DACA sebagai variabel independen. Data dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan dari jurnal, buku, laporan resmi, dan sumber kredibel lainnya. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mereduksi data, yang kemudian diinterpretasikan menggunakan teori Leader Trait Analysis dari Margaret G. Hermann untuk memahami karakteristik kepemimpinan Trump (Mas'ood, 1994).

Tinjauan Pustaka

Artikel jurnal utama yang digunakan dalam penelitian ini berjudul “*The Trump Administration and the War on Immigration Diversity*”, yang ditulis oleh Kevin R. Johnson dan Rose Cuison-Villazor dalam jurnal Wake Forest Law Review. Artikel ini membahas tentang kebijakan imigrasi pemerintahan Trump yang mengungkap perang yang dilakukan lembaga eksekutif terhadap keberagaman imigrasi baik dalam penerimaan maupun deportasi serta tantangan pemerintahan Trump dalam pengaplikasian kebijakan imigrasi. Dijelaskan bahwa jika dikaitkan dengan sejarah undang-undang dan kebijakan imigrasi di AS, perang melawan keberagaman imigrasi ini semakin memperkuat tujuan pemerintah untuk kembali ke kebijakan imigrasi sebelum tahun 1965 yang dirancang untuk mempertahankan negara kulit putih. Artikel ini menjelaskan bagaimana kebijakan anti-imigrasi pemerintahan Trump dengan menyoroti cara-cara di mana undang-undang dan kebijakan imigrasi secara eksplisit dan implisit berusaha mengecualikan warga negara AS yang bukan warga negara berdasarkan ras. Sejak menjadi kandidat dan Presiden, Donald Trump telah menyatakan kebenciannya terhadap imigran kulit berwarna dan komitmennya untuk membatasi imigrasi ke AS. Artikel ini juga menjelaskan cara-cara yang dilakukan oleh individu dan kelompok untuk menentang undang-undang dan kebijakan yang diskriminatif tersebut melalui undang-undang kebijakan, termasuk

mendorong kebijakan pengesahan Undang-Undang Imigrasi tahun 1965 yang memungkinkan adanya keragaman yang lebih besar dalam arus imigran dan meningkatkan imigrasi Amerika Latin dan Asia ke AS. Kemudian, artikel ini mengkaji secara kritis kebijakan-kebijakan kontemporer yang dikeluarkan oleh Presiden Trump yang menjelaskan perang pemerintahannya terhadap keberagaman imigrasi. Hal ini dipaparkan dengan menyoroti undang-undang yang berupaya membatasi tidak hanya masuknya imigran rasial namun juga kebijakan yang dirancang untuk mengusir imigran kulit berwarna dari AS. Kebijakan itu telah melanggar Undang-Undang Imigrasi tahun 1965 yang bertujuan untuk mempromosikan keberagaman dalam undang-undang imigrasi (Johnson, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Gaya Kepemimpinan Donald Trump dalam Kebijakan Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) pada Dreamers

Guna melihat gaya kepemimpinan Trump dalam kebijakan DACA yaitu melalui teori *Leader Trait Analysis* yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann, dkk. Peneliti akan mengolahnya menggunakan tiga parameter utama, sesuai dengan kerangka konsep yang dikembangkan oleh Hermann, dkk. parameter tersebut meliputi *Reaction to Political Constraints* (Reaksi terhadap kendala Politik), *Openness to Information* (Keterbukaan Pada Informasi), dan *Motivation for Action* (Motivasi dalam Bertindak).

1. Reaksi Donald Trump terhadap Kendala Politik dalam Kebijakan DACA

Seorang pemimpin yang dominan dinilai dari kepekaannya terhadap kendala politik dalam mengelola kebijakan luar negeri. Kepekaan ini menjadi kunci dalam melihat gaya kepemimpinan karena pemimpin yang responsif terhadap kendala politik dapat mengarahkan kebijakan sesuai dengan tujuan awalnya atau justru beralih fokus untuk menyelesaikan kendala tersebut (Hermann, 2001). Kendala politik, dalam konteks ini, didefinisikan sebagai

hambatan yang memengaruhi pencapaian tujuan tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Seorang pemimpin yang dominan cenderung berperan aktif dalam negosiasi dan membangun konsensus dengan aktor domestik serta mitra internasional. Karakteristik ini penting dalam memahami bagaimana pemimpin menghadapi tantangan dan mengelola kebijakan secara efektif (Griebie, 2021).

Selama masa jabatannya, Donald Trump menunjukkan gaya kepemimpinan yang kontroversial dengan berfokus pada agenda “America First,” yang sering kali berseberangan dengan pandangan multilateral dan kebijakan luar negeri tradisional AS. Sebagai pemimpin, Trump memegang kendali penuh dalam menentukan arah kebijakan luar negeri yang didominasi oleh pendekatan unilateralisme dan proteksionisme. Gaya ini mencerminkan sikap dominannya yang kurang mempertimbangkan kendala politik, baik domestik maupun internasional. Misalnya, ketika ia berusaha menghapus kebijakan Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), Trump menghadapi kritik dari berbagai pihak, termasuk lembaga domestik seperti Kongres dan aktor internasional (Pierce, 2018).

Pemimpin yang kurang peka terhadap konteks politik biasanya mengambil tindakan tegas dan langsung, yang sering kali mengarah pada keputusan yang cepat tanpa mempertimbangkan implikasi jangka panjang. Trump menunjukkan kecenderungan ini dengan tindakannya yang tidak konsisten dan impulsif, terutama dalam berkomunikasi melalui media sosial, seperti Twitter, yang sering kali menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan kebijakan (Sarah Pierce, 2018). Gaya komunikasi ini bukan hanya menimbulkan kontroversi di dalam negeri, tetapi juga memengaruhi hubungan AS dengan negara-negara lain, yang pada akhirnya mencerminkan ketidakstabilan dalam kebijakan luar negeri AS. Sebagai pemimpin yang dominan, Trump memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang didasarkan pada ambisi pribadinya untuk mempertahankan citra dan reputasi AS sesuai dengan visinya. Misalnya, saat berhadapan dengan kebijakan DACA, Trump menunjukkan sikap menantang

terhadap berbagai hambatan politik yang muncul, baik dari Partai Demokrat, komunitas internasional, maupun kelompok advokasi domestik yang membela hak-hak imigran (Magana, 2020). Upayanya untuk menghapus DACA dihadapi dengan perlawanan hukum yang kuat, dan meskipun Mahkamah Agung AS menolak penghapusan tersebut, Trump tetap bersikukuh mengubah kebijakan tersebut sesuai dengan pandangannya (Creswell, 2014).

Trump mencerminkan karakteristik pemimpin yang menolak kendala politik, atau dikenal sebagai *crusader leader*, yang fokus pada implementasi kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip pribadinya. Meskipun pendekatan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian, Trump terus menentang hambatan yang muncul, baik dari pihak domestik maupun internasional, dan tetap berusaha mewujudkan visinya terhadap kebijakan imigrasi (Hermann, 2001). Sikap ini memperlihatkan bahwa, dalam pandangan Trump, kendala politik bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk memperkuat citranya sebagai pemimpin yang tangguh dan tidak mudah dikendalikan. Oleh sebab itu, Trump tergolong kedalam pemimpin *crusader*.

2. Keterbukaan Informasi Trump terhadap Kebijakan DACA

Pemimpin politik memiliki tingkat keterbukaan yang berbeda terhadap informasi kontekstual, bergantung pada tingkat kepercayaan diri dan kompleksitas konseptual yang dimiliki masing-masing. Pemimpin yang keterbukaannya tinggi terhadap informasi umumnya lebih pragmatis dan responsif terhadap berbagai kepentingan, kebutuhan, ide, dan tuntutan dari pihak lain. Menurut Hermann dalam "Assessing Leadership Style: A Trait Analysis," pemimpin yang terbuka terhadap informasi umumnya adalah mereka yang terpilih melalui pemilihan umum, bukan mereka yang memperoleh kekuasaan melalui garis keturunan. Pemimpin seperti ini mengelola keputusan dengan struktur yang memungkinkan adanya arus informasi dua arah, sehingga terdapat ruang untuk pertukaran pendapat bagi aktor lain yang terlibat (Hermann, 2001).

Sebaliknya, pemimpin yang kurang peka terhadap konteks politik cenderung menutup diri terhadap informasi. Mereka bersikap seperti advokat yang hanya memilih informasi yang mendukung persepsi dan posisinya, serta sering kali mengabaikan bukti yang tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Donald Trump termasuk ke dalam kategori ini karena ia menunjukkan kecenderungan untuk menolak informasi yang bertentangan dengan pandangannya. Hal ini terlihat jelas ketika ia mengambil sikap tegas terhadap kebijakan Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Dalam pidatonya sebagai kandidat presiden, Trump menyatakan bahwa ia akan segera mengakhiri "perintah eksekutif ilegal" yang dikeluarkan oleh Obama terkait kebijakan imigrasi. Pernyataan ini tidak hanya tercantum dalam dokumen kampanyenya, tetapi juga disampaikan secara tegas dalam pidato di Arizona pada 31 Agustus 2016, di mana ia berjanji untuk segera mengakhiri kebijakan DACA dan kebijakan terkait lainnya yang dinilai tidak sah (Johnson, 2017).

Setelah memenangkan pemilihan, Trump sedikit mengubah nada bicaranya. Dalam wawancara dengan program "60 Minutes," ia mengungkapkan pandangan yang lebih moderat mengenai deportasi imigran tanpa dokumen. Meskipun DACA tidak disebutkan secara eksplisit, ada indikasi bahwa ia mungkin akan memberikan pengecualian tertentu bagi imigran muda yang disebut Dreamers. Namun, sikap yang lebih lunak ini hanya bersifat sementara karena Trump kemudian kembali pada retorika awalnya, menekankan niatnya untuk menegakkan kebijakan yang lebih keras terhadap imigrasi ilegal (Stahl, 2016).

Keputusan Trump untuk menolak masukan dari berbagai pihak memperlihatkan kecenderungannya untuk mengabaikan konteks politik dan mempertahankan pandangan pribadinya. Misalnya, ketika Mahkamah Agung AS pada Juni 2020 menyatakan bahwa upaya Trump untuk mengakhiri DACA tidak sah dan melanggar hukum, Trump tetap melanjutkan usahanya untuk menentang keputusan tersebut. Tanpa mematuhi putusan pengadilan, ia malah mengeluarkan memo kebijakan baru yang memotong separuh masa perlindungan DACA dan menolak aplikasi baru dari ratusan ribu calon penerima

manfaat yang seharusnya memenuhi syarat (National Immigration Law, 2016). Ini menunjukkan bahwa Trump tetap pada posisinya meskipun terdapat desakan kuat dari Mahkamah Agung dan berbagai organisasi.

Banyak pihak, termasuk ekonom dan pemimpin bisnis, tidak sependapat dengan pandangan Trump terkait dampak kebijakan imigrasi terhadap perekonomian. Tingkat pengangguran yang mendekati titik terendah dalam 16 tahun terakhir dan kebutuhan perusahaan akan lebih banyak tenaga kerja menunjukkan bahwa imigran memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian AS. Otomatisasi dan kekurangan tenaga kerja telah menjadi tantangan besar bagi pertumbuhan ekonomi selama pemulihan pasca-Resesi Besar, dan imigran membantu menutupi kekurangan tersebut (Pierce, 2018).

Trump, bagaimanapun, tetap pada keyakinannya bahwa penghapusan DACA adalah langkah yang tepat meskipun banyak masukan yang menekankan dampak negatif kebijakan tersebut terhadap komunitas dan perekonomian. Sikap ini memperlihatkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang cenderung tertutup terhadap informasi yang tidak mendukung visinya, sekaligus menunjukkan bahwa ia lebih mengutamakan implementasi agendanya daripada menerima input dari pihak lain. Trump lebih memilih untuk tetap berpegang pada interpretasi pribadinya daripada mempertimbangkan informasi yang ada secara objektif. Untuk memperlihatkan gambaran yang lebih jelas perihal parameter keterbukaan terhadap informasi ini, peneliti merangkunya menjadi sebuah analisis yang menunjukkan sikap Trump dalam menanggapi input atau informasi yang masuk.

3. Motivasi Bertindak

Pemimpin politik umumnya dimotivasi oleh fokus internal, ideologi, dan kepentingan tertentu. Mereka mencari persetujuan, kekuasaan, dukungan, status, dan pengakuan dari pihak-pihak yang relevan. Dalam beberapa kasus, motivasi mereka juga dapat dipengaruhi oleh keyakinan pribadi, yang mendorong mereka bertindak berdasarkan prinsip yang mereka anut. Menurut kerangka

konseptual Margaret G. Hermann, terdapat dua tipe pemimpin: relationship-focused leader dan problem-focused leader. Pemimpin tipe pertama dimotivasi oleh niat untuk menjaga kelangsungan kelompok dan membangun hubungan baik dengan kolega, sementara pemimpin tipe kedua berorientasi pada pencapaian kebijakan dan penyelesaian masalah yang telah dimulai sebelumnya. Pemimpin dengan orientasi hubungan cenderung membangun konsensus, jaringan, dan interaksi kolegal untuk mempertahankan citra lembaga atau kelompok yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang berfokus pada pemecahan masalah lebih menekankan pada pencapaian agenda dan kebijakan yang konkret, meski harus menentang arus atau mengabaikan saran dari pihak lain. Pemimpin seperti ini cenderung menonjolkan komunikasinya untuk mencapai tujuan dan memperlihatkan ketegasan dalam pengambilan keputusan, tanpa terlalu peduli pada penerimaan pihak lain (Hermann, 2001).

Jika kita menelaah kebijakan luar negeri Donald Trump, ia cenderung menunjukkan ciri-ciri sebagai pemimpin yang problem-focused. Trump lebih berfokus pada tujuan yang ingin ia capai, tanpa mempertimbangkan penerimaan atau penolakan dari pihak lain. Sikap ini tercermin dalam pendekatannya terhadap kebijakan imigrasi, terutama terkait dengan Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). Sebagai seorang pemimpin yang berorientasi pada hasil, Trump tidak mengedepankan masukan-masukan dari aktor lain yang menentang niatnya untuk menghapus program tersebut. Sikap keras ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang directive leader yang percaya bahwa keyakinannya adalah benar dan siapa pun yang tidak mendukungnya dipandang sebagai penghalang (Eremin, 2021).

Selama masa jabatannya, Trump secara konsisten berusaha mengakhiri DACA meskipun mendapatkan banyak masukan yang menunjukkan dampak negatif dari kebijakannya. Pada awalnya, ia berjanji untuk “segera mengakhiri perintah eksekutif ilegal Presiden Obama terkait imigrasi” dalam kampanyenya pada tahun 2015. Namun, setelah terpilih, ia menghadapi dilema dalam menentukan langkah yang tepat. Ia sempat menyatakan “*I love these kids, I love*

kids,” dalam sebuah wawancara, tetapi di saat yang sama ia terpaksa menuruti tekanan dari basis konservatif yang memilihnya karena sikap keras terhadap imigrasi (Galindo, 2020).

Pada 5 September 2017, Trump secara resmi memerintahkan untuk mengakhiri DACA, memberikan waktu enam bulan kepada Kongres untuk meloloskan RUU guna menyelamatkan kebijakan ini. Namun, upayanya ditantang oleh berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan, yang menilai bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan pada Juni 2020 bahwa upaya Trump untuk mengakhiri DACA tidak sah karena gagal memberikan justifikasi yang memadai. Hakim Agung John Roberts menyatakan bahwa walaupun pemerintahan Trump memiliki hak untuk mengakhiri DACA, mereka harus memberikan alasan yang lebih rinci (Waslim, 2020).

Selain itu, mengakhiri DACA akan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi AS. Menurut laporan Institute on Taxation and Economic Policy, penerima DACA berkontribusi sekitar \$2 miliar dalam bentuk pajak negara bagian dan lokal setiap tahun. Menghentikan program ini akan mengurangi pendapatan negara sebesar \$800 juta per tahun dan membebani pemerintah sekitar \$60 miliar untuk mendeportasi para penerima program (Mayda, 2017). Dari rangkaian kebijakan ini, terlihat jelas bahwa Trump adalah pemimpin yang termotivasi untuk mencapai tujuan spesifik dan tidak mempertimbangkan dampak negatif yang lebih luas. Ia lebih peduli pada pencapaian target kebijakannya daripada membangun konsensus atau mempertahankan hubungan yang harmonis dengan aktor lain, sehingga ia dapat dikategorikan sebagai pemimpin dengan gaya problem-focused yang tegas dan tidak fleksibel dalam menerima masukan.

Kesimpulan

Dalam menanggulangi banyaknya imigran ilegal yang masuk ke AS maka mantan Presiden Barack Obama mengeluarkan kebijakan Deferred Action for

Childhood Arrivals (DACA) untuk memberikan izin menetap sementara yang bisa diperpanjang dalam jangka waktu 2 tahun. Namun, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden telah membuat ketidakpastian hukum bagi penerima DACA. Hal ini telah dimulai sejak masa kampanye Trump tahun 2016 yang menggunakan slogan “*Make America Great Again*” yang mendahulukan kepentingan masyarakat asli di atas yang lainnya. Langkah ini diawali dengan rencana penghapusan DACA saat masa kampanye yang berlanjut hingga Trump menjadi presiden. Dengan diumumkannya kerangka penghapusan DACA pada 5 September 2017 oleh Jaksa Agung Jeff Sessions dinilai sebagai langkah keras Trump dalam menanggulangi permasalahan imigrasi. Trump berpendapat bahwa permasalahan imigran merupakan hal yang menghambatnya dalam mensejahterakan masyarakat asli AS. Karena itu, Trump selalu berupaya untuk mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengurangi jumlah imigran di AS. Meskipun pada akhirnya kebijakan DACA tidak jadi dihapuskan namun dengan beberapa kebijakan yang diubah oleh Trump menunjukkan keseriusan Trump dalam menanggulangi permasalahan imigran di AS. Selama proses tersebut, Trump telah menunjukkan motivasi, menentang kendala politik, dan mengabaikan seluruh input dan informasi yang dilayangkan padanya, sehingga Trump dicirikan sebagai pemimpin *crusader*, *directive*, dan *goal-driven* sesuai dengan kerangka pemikiran Margaret G. Hermann, dkk.

Daftar Pustaka

- Abramitzky, R., L. Boustan & D. S. Connor, “Leaving the enclave: Historical evidence on immigrant mobility from the industrial removal office.” *The Journal of Economic History* 84 no.2 (2024).
- Abramowitz, Alan. “The Great Alignment: Race, Party Transformation, and the Rise of Donald Trump.” *Yale University Press* (2018).
- A. Carati & A. Locatelli, “All the President's men. Leadership style, advisory system and Donald Trump's mixed record in foreign policy,” *Global Policy* 14, no.1 (2023).

- Alulema, Daniela. "DACA and the Supreme Court: How We Got to This Point, a Statistical Profile of Who Is Affected, and What the Future May Hold for DACA Beneficiaries," *Journal on Migration and Human Security* 7, no.4 (2019).
- Amuedo-Dorates, Catalina, and Fransisca Antmant. "Schooling and Labor Market Effects of Temporary Authorization: Evidence from DACA." *Journal of Population Economics* 30 (2017): 339-373.
- Associated Press, "Pentagon Sending More Troops to the Southwest Border," Associated Press, April 29, 2019, <https://apnews.com/27e34a4200a844f7b282ee7e9b7f97c6>.
- Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Bataloya, Jeanne & Mittelstadt, Michelle. Relief from Deportation: Demographic Profile of the DREAMers Potentially Eligible under the Deferred Action Policy. Migration Policy Institute. 2012.
- Batalova, Jeanna, Sarah Hooker, and Randy Capp with JamesD. Bachmeier and Erin Cox, "Deferred Action for Childhood Arrivals at the One Year Mark." Migration Policy Institute, August 8, 2013, diakses pada 12 January 2024, https://www.migrationpolicy.org/sites/default/files/publications/DACA_2013-FINAL.pdf
- Becerra, Cesar. "Keep the Dream Alive: the DACA Dilemma." *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education* 40, no.6 (2019): 847-858.
- Blair, Gwenda. *The Trump: Three Generations That Built an Empire* (Simon and Schuster, 2015).
- Black, Conrad. *Donald J. Trump: A President Like No Other* (Regnery Publishing, 2018).
- Canellos, Peter S. "Obama victory took root in Kennedy-inspired Immigration Act", 2008, diakses pada 15 April 2024, https://web.archive.org/web/20090805201920/http://www.boston.com/news/politics/2008/articles/2008/11/11/obama_victory_took_root_in_kennedy_inspired_immigration_act/?page=full
- Castañeda, A. "US Immigration Policy: Trump Administration Adjustments." *Lineasur* 14 (2018).

- Chacko, Elizabeth. "Immigration and Populist Policies in The United States of America." Victoria University of Wellington.
- Cincotta, Howard. ed, *Garis Besar Sejarah Amerika* (United States Information Agency, 1 Januari, 1994).
- Cisneros, J. D. "A nation of immigrants and a nation of laws: Race, multiculturalism, and neoliberal exception in Barack Obama's immigration discourse." *Communication, Culture & Critique* 8, no.3 (2015).
- Colbert, A. E., Judge, T. A., D. Choi & G. Wang, "Assessing the trait theory of leadership using self and observer ratings of personality: The mediating role of contributions to group success." *The leadership quarterly* 23, no. 4 (2012).
- Dávila-Ruhaak, Sarah., Steven D. Schwinn, Jennifer Chan, Joint Submission to The U.N. Committee Against Torture Concerning the United States' Mistreatment of Immigrant Detainees in Violation Of The Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment In Relation To the United States 5th Periodic Report On the Convention Against Torture, Center and Clinical White Papers (2014), citing, U.N Convention Against Torture at Art. 2(1).
- Dodo, Mahamat K. "My Theory on the Trump's Phenomenon. Why Donald Trump? And Why Now?." *Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences* 7, no.4 (2016).
- Dombrowski, Peter dan Reich, Simon. "Does Donald Trump have a grand strategy?." *International Affairs* 93, no 5 (2017).
- Edwards III and George C., "Was Donald Trump an Effective Leader of Congress?." *Presidential Studies Quarterly* 51, no.1 (2021).
- Edwards, Ryan & Ortega Francesc. The Economic Impacts of Removing Unauthorized Immigrant Workers An Industry and State Level Analysis, 2016, dikutip dari Center for American Progress: <https://www.americanprogress.org/issues/immigration/reports/2016/09/21/144363/the-economicimpacts-of-removing-unauthorized-immigrant-workers/>
- Eremin, A. A. "US migration policy radicalization (2017-2019): Case of Mexico and Central America. Vestnik RUDN." *International Relations* 21, no.1 (2021).

- Evans, Nicholas J. "Work in Progress: Indirect Passage from Europe Transmigration via the UK, 1836–1914." *Journal for Maritime Research* 3, no. 1 (Desember 2001).
- Griebie, A. M., The influence of personality on presidential leadership style (with a case study of Donald J. Trump, 45th President of the United States), 2021.
- Haberman, Maggie. "Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America." *Penguin* (2022).
- Harrington, B. "An overview of discretionary reprieves from removal: Deferred action, DACA, TPS, and others." *Current Politics and Economics of the United States* 20, no.1 (2018).
- H, De Berg, "Leadership Style. In Trump and Hitler: A Comparative Study in Lying," Cham: Springer Nature Switzerland (2024).
- Hermann, Margaret G. "Assessing Leadership Style: Trait Analysis." *The Psychological Assessment of Political Leaders* 7, no. 2 (2005): 178-212.
- Hermann, Margaret G. dkk. "Who Leads Matters: The Effect of Powerful Individuals." *International Studies Association* (2001): 83-131.
- Hutchison, Hugh. "Continuity and Change: Comparing the Securitization of Migration under the Obama and Trump Administration." *Perception: Journal of International Affairs* 25, no.1 (2020): 81-98.
- ICE, "ICE Shifts Resources to Address Crisis at Southwest Border" (news release, April 29, 2019), www.ice.gov/news/releases/ice-shifts-resources-address-crisis-southwest-horder.
- Ishiwata, E. & Muñoz, S. M. "They Tried to Bury Us": Scholar Advocacy in the Wake of the DACA Rescission," *New Political Science* 40, no.3 (2018).
- James, Toby S. "The Effects of Donald Trump." *Policy Studies* 42 (2021).
- Jeffery, Passel. Unauthorized Immigrant Population Stable for Half a Decade. Dikutip dari Pew Research Center Report (2016), <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2016/09/21/unauthorized-immigrantpopulation-stable-for-half-a-decade/>
- Johnston, David Cay. *The Making of Donald Trump* (Melville House, 2016).
- Johnson, Kevin R., and Rose. "The Trump Administration and the War on Immigration Diversity." *Wake Forest Law Review* 54 (2019): 101-143.

- Johnson, J. "Trump: 'No second thoughts' on DACA decision." *The Washington Post* (2017).
- Jones, Richard C. "Policy Implication of Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) on the Educational and Occupational Fortunes of Young Mexican-Born Adults." *Paper in Applied Geography* 4, no.3 (2018): 229-242.
- Kurtzleben, Danielle. "Fact Check: Are DACA Recipients Stealing Jobs Away From Other Americans?." *National Public Radio, September 6, 2017*, diakses pada 22 November 2023, <https://www.npr.org/2017/09/06/548882071/fact-check-are-daca-recipients-stealing-jobs-away-from-other-americans>
- Leal, Mason. "Trump Card: What the End of Deferred Action for Childhood Arrivals Means for Texas and its Administrative Agencies." *Tex Tech Admin L. J.* 20 (2019).
- Lee, Sunwoo. "A Right-Based Approach to the Rescission of Deferred Action for Childhood Arrivals." *Journal of Immigrant and Refugee Studies* 20, no. 1 (2022): 94-108.
- Martin, Philip P. "Election of Donald Trump and Migration." *Migration Letters* 14, no. 1 (2017).
- Mas'ood, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1990.
- Massey, D. S. "The Real Crisis at the Mexico-US Border: A Humanitarian and Not an Immigration Emergency." In *Sociological Forum* 35, no. 3 (2020).
- Mazza, J. "The US-Mexico border and Mexican migration to the United States: A 21st century review." *SAIS Rev. Int'l Aff.* 37 (2017).
- McAdams, Dan P. "The Mind of Donald Trump." *The Atlantic* 5 (2016).
- Moran, Rachel F. "Dreamers Interrupted: The Case of the Rescission of the Program of Deferred Action for Childhood Arrivals." *UC Davis L. Rev* 53 (2019): 1905-1955.
- Napolitano, Janet Exercising prosecutorial discretion with respect to individuals who came to the United States as children. (United States Department of Homeland Security), 2012.

National Immigration Law Center, Summary of the U.S. Supreme Court's Decision in the DACA Cases, June 24, 2022, diakses pada 22 Mei, 2024 <https://www.nilc.org/issues/daca/summary-of-scotus-decision-in-the-daca-cases/>

National Immigration Law Center, Supreme Court Overturns Trump Administration's Termination of DACA, on June 22, 2020, diakses pada 22 Mei, 2024, <https://www.nilc.org/issues/daca/alert-supreme-court-overturns-trump-administrations-termination-of-daca/>

Nawaz, Z. A. & I. Khan, "Leadership theories and styles: A literature review," *Leadership* 16, no.1 (2016).

Nguyen, C., and Maraki Kebede. "Immigrant Students in the Trump Era: What We Know and Do Not Know." *Educational Policy* 31, no.6 (2017): 716-742.

Act and Deferred Action for Childhood Arrivals in the USA." *International Journal of Sociology and Social Policy* 33, no. 11 (2013).

Schmidt, Paul Wickham. "An Overview and Critique of US Immigration and Asylum Policies in the Trump Era," *Journal on Migration and Human Security* 7, no. 3 (2019): 92-102.

Scott, Hugh E. *Donald Blowhard Trump : Racist GOP Liar-in-Chief* (Freedom Publisher, 2016).

Setzler, Mark dan Yanus, Alixandra B. "Why did women vote for Donald Trump?." *PS: Political Science & Politics* 51, no.3 (2018).

Shapiro, Marc. *Trump this! : The Life and Times Donald Trump : am Unauthorized Biography* (Riverdale Avenue Books, 2016).

The Politico, "Full text: 2017 Donald Trump inauguration speech transcript", 2017, diakses pada 15 April 2024, <https://www.politico.com/story/2017/01/full-text-donald-trump-inauguration-speech-transcript233907>

The White House, Office of the Press Secretary, Statement from President Donald J. Trump on 5 September 2017.

Thronson, David B. "Closing the Gap: DACA, DAPA, and U.S. Compliance with International Human Rights Law." *Case Western Reserve Journal of International Law* 48 (2016).

- Toossi, M. "Labor force projections to 2024: The labor force is growing, but slowly." *Monthly Lab. Rev.* 138, no 1 (2015).
- U.S. Department of Health and Human Services (HHS) Office of Inspector General, "Separated Children Placed in Office of Refugee Resettlement Care" (issue brief, HHS, Washington, DC, January 2019), <https://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-BL-18-00511.pdf>.
- Venkataramani A, Shah S; O'Brien R; Kawachi I & Tsai, A. Health Consequences of the US Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) Immigration Programme: A Quasiexperimental Study. (*The Lancet Public Health*: 2017)
- Volley, Jeffrey J. *Donald Trump and the Know-Nothing Movement: Understanding the 2016 US Election* (Palgrave Pivot, 2018).
- Volpp, L. "Immigrants Outside the Law: President Obama, Discretionary Executive Power, and Regime Change." *Jurnal Critical Analysis of Law* (2016).
- White House, "Executive Order 13841 of June 20, 2018: Affording Congress an Opportunity to Address Family Separation," *Federal Register* 83, no. 122 (June 25, 2018): 29435-36 www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-06-25/pdf/2018-13696.pdf.
- Wood, R. H. "The crushing of a dream: DACA, DAPA, and the politics of immigration law under President Obama." *Barry L. Rev.* 22 (2016).
- Zaitchik, Alexander. *The Gilged Rage: A Wild Ride Through Donald Trump's America* (Hot Books, 2016).